

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV/SETARA



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERENCANA AHLI MUDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. HENRI AGUSLAN, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2022.

Pihak Kedua,

SEKRETARIS

Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19670818 199401 1 002

Pihak Pertama,

PERENCANA AHLI MUDA

H. HENRI AGUSLAN, SE, M.Si
PEMBINA
NIP. 19690817 199003 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERENCANA AHLI MUDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
			3	4
1	2			
1	Terlaksananya penyusunan perencanaan program dan kegiatan BPKAD	1	Tersedianya konsep Renja/Perubahan Renja	2 Dokumen
		2	Terkumpulnya Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II, III, IV dan Staf	1 Dokumen
		3	Tersedianya RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	4 Dokumen
2	Terlaksananya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	1	Tersedianya dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen
		2	Tersedianya dokumen analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan	12 Dokumen
		3	Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan program dan kegiatan	4 Dokumen
		4	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD	1 Dokumen
		5	Tersedianya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah BPKAD Provsu	1 Dokumen
		6	Tersedianya dokumen SPIP	1 Dokumen
3	Terlaksananya Informasi dan Dokumentasi dan Publikasi kinerja BPKAD	1	Tersedianya Informasi dan dokumentasi publikasi kinerja BPKAD	1 Kegiatan

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 99.810.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 9.090.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 9.090.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 9.090.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 9.090.000,00
J U M L A H		RP. 136.170.000,00

Pihak Kedua,

SEKRETARIS


Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19670818 199401 1 002

Medan,

2022

Pihak Pertama,

PERENCANA AHLI MUDA


H. HENRI AGUSLAN, SE, M.Si
PEMBINA
NIP. 19690817 199003 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irwanda Pulungan, S.Sos
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Hendra Yudi, M.Kes
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan,

Pihak Kedua
SEKRETARIS


Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
PEMBINA TK. I
NIP. 19670818 199401 1 002

Pihak Pertama
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA


IRWANDA PULUNGAN, S.Sos
PENATA TK. I
NIP. 19680513 199007 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penyusunan SPM yang tepat waktu sesuai Peraturan Dan Perundang-Undangan yang berlaku	Jumlah SPM yang tersedia dan tersusun tepat waktu sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku	55 Dokumen
2	Terlaksananya Akuntansi BPKAD terkait Pelaporan Keuangan baik harian, bulanan maupun tahunan yang tepat waktu sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Jumlah dokumen yang tersedia terkait pelaksanaan Akuntansi BPKAD terkait Pelaporan Keuangan baik laporan bulanan, triwulan, semesteran dan akhir tahun	1 Laporan
3	Terlaksananya pengesahan SPJ yang terverifikasi sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bukti SPJ yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus	1200 Dokumen
4	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan BPKAD Provsu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen pengesahan SPJ yang terverifikasi tercapai sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan	2000 Dokumen
5	Tersedianya Bahan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran BPKAD yang tersusun dan tersedia tepat waktu sesuai Peraturan Dan Perundang-Undangan yang berlaku	2 Laporan
6	Tersedianya dokumen laporan realisasi keuangan setiap bulan dengan tepat waktu	Jumlah Laporan Realisasi keuangan setiap bulan dengan tepat waktu	12 Bulan
7	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Tahunan yang tepat waktu sesuai Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Keuangan setiap tahun dengan tepat waktu	1 Laporan

8	Terlaksananya Penatausahaan Administrasi terkait Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN BPKAD	26 Dokumen
9	Tersedianya Dokumen kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran	Jumlah Dokumen yang diteliti kelengkapannya terkait SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran	55 Dokumen
10	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan terkait penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS secara tepat waktu	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN BPKAD yang tersedia tepat waktu sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku	26 Dokumen
11	Terlaksananya Pelaporan Keuangan BPKAD	Jumlah bahan Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKAD dan tersusunnya Laporan Keuangan BPKAD tepat waktu sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku	1 Laporan
12	Terlaksananya kegiatan meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK	Jumlah Dokumen yang diteliti terkait kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK	30 Dokumen

KEGIATAN		ANGGARAN	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	17,031,926,367
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	391,092,000
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	1,330,680,000
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp	9,000,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	9,000,000
6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Rp	9,000,000
7	Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp	50,832,000

8	penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	9,000,000
	Jumlah.....	Rp	18,840,530,367

Pihak Kedua
SEKRETARIS



Drs. HENDRA BUDI, M. Kes
PEMBINA TK. I
NIP. 19670818 199401 1 002

Medan,
Pihak Pertama
**ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA**



IRWANDA PULUNGAN, S.Sos
PENATA TK. I
NIP. 19680513 199007 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Abdul Syukur Tambunan**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. HENDRA YUDI, M.Kes**
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi..

Medan,

Pihak Kedua
SEKRETARIS


Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
PEMBINA TK. I
NIP. 19670818 199401 1 002

Pihak Pertama
KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


Drs. ABDUL SYUKUR TAMBUNAN
PENATA TK. I
NIP. 19670326 198611 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Terlaksananya pengiriman surat dan paket	600 Dokumen
		2 Tersedianya Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 tempat
		3 Terpeliharanya dengan baik peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan
		4 Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8 unit
		5 Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan	12 bulan
		6 Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan
		7 Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan	12 bulan
		8 Tersedianya Barang Bacaan dan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan
		9 Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan
		10 Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	12 bulan
		11 Tersedianya Jasa Kebersihan	12 bulan
		12 Tersedianya Jasa Keamanan	12 bulan
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran	1 Tersedianya Jasa Sewa Gedung Kantor BPKAD	12 bulan
		2 Tersedianya Meubeler	1 kegiatan
		3 Tersedianya Komputer	1 kegiatan
		4 Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan
		5 Terlaksananya Penyimpanan dan Pengarsipan Berkas BPKAD	12 bulan
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Tersedianya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian BPKAD	1 laporan
		2 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	19 orang

	KEGIATAN		ANGGARAN
I	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	364.178.304
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		364.178.304
II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	610.993.304
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		172.850.000
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		225.078.304
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		213.065.000
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	3.481.954.309
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		155.704.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		573.160.375
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		332.371.130
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		726.169.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		200.000.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		69.504.000
7	Fasilitas Kunjungan Tamu		240.800.000
8	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		818.400.000
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		190.367.500
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		175.478.304
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	75.000.000
1	Pengadaan Mebel		75.000.000
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	5.621.531.424
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		166.878.304
2	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		1.531.061.600
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengk 69		334.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3.589.591.520
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		1.321.712.800
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1.026.470.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		295.242.800
	Jumlah.....	Rp	11.475.370.141

SEKRETARIS

Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19670818 199401 1 002

Medan,
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



Drs. ABDUL SYUKUR TAMBUNAN
PENATA TK. I
NIP. 19670326 198611 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN: 2022
KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN ANGGARAN I
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Faisal, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. MHD. RAHMADANI LUBIS, SE, MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
ANGGARAN

H. MHD. RAHMADANI LUBIS, SE, MM
PEMBINA
NIP. 19721003 199303 1 005

Medan,

Pihak Pertama,

KASUBBID PENGELOLAAN
ANGGARAN I

Muhammad Faisal, SE
PENATA Tk I
NIP. 19800529 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN ANGGARAN I

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS tepat waktu dan sesuai ketentuan	2 Dokumen – 3 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tepat waktu dan sesuai ketentuan	2 Dokumen – 2 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Berita Acara Review RKA-SKPD	49 Dokumen – 1 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Berita Acara Review Perubahan RKA-SKPD	49 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Berita Acara Review DPA-SKPD	49 Dokumen – 1 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Berita Acara Review Perubahan DPA-SKPD	49 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Buku Peraturan Daerah Tentang APBD	1 Dokumen – 2 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Buku Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	1 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
2	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Investasi Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien	1 Dokumen
	- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah Tepat Sasaran dan Akuntabel	1 Dokumen

	- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tersalurkannya dana bagi hasil provinsi sumatera utara kepada kab/kota	33 Dokumen – 4 Triwulan
	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersalurkannya bantuan keuangan provinsi sumatera utara kepada kab/kota	33 Dokumen – 1 Tahun
3	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Tersedianya data bidang keuangan daerah yang akurat	1 Dokumen - 4 Bulan
	- Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya proses pengelolaan data APBD pada Aplikasi SIPD	1 Kegiatan – 12 Bulan

Kegiatan	Anggaran (Rp)
1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	181.201.150
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	146.602.650
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	56.132.500
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	230.835.000
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	64.837.000
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	230.423.000
7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	454.586.500
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	606.515.000
9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	9.795.000
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	140.525.000
11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	9.285.000
12. Analisis Investasi Pemerintah Daerah	114.199.000
13. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	65.905.000
14. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	34.694.000
15. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	33.330.000
16. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	86.996.000
17. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	509.939.910
Jumlah	2.975.803.710

Medan,

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
ANGGARAN

H. MHD. RAHMADANI LUBIS, SE, MM
PEMBINA
NIP. 19721003 199303 1 005

Pihak Pertama,

KASUBBID PENGELOLAAN
ANGGARAN I

Muhammad Faisal, SE
PENATA Tk I
NIP. 19800529 200901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN: 2022
KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN ANGGARAN II
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Syafei, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. MHD. RAHMADANI LUBIS, SE, MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
ANGGARAN

H. MHD. RAHMADANI LUBIS, SE, MM
PEMBINA
NIP. 19721003 199303 1 005

Medan,

Pihak Pertama,

KASUBBID PENGELOLAAN
ANGGARAN II

Ahmad Syafei, SE
PENATA
NIP. 19721201 200701 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN ANGGARAN II

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS tepat waktu dan sesuai ketentuan	2 Dokumen – 3 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tepat waktu dan sesuai ketentuan	2 Dokumen – 2 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Berita Acara Review RKA-SKPD	49 Dokumen – 1 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Berita Acara Review Perubahan RKA-SKPD	49 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Berita Acara Review DPA-SKPD	49 Dokumen – 1 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Berita Acara Review Perubahan DPA-SKPD	49 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Buku Peraturan Daerah Tentang APBD	1 Dokumen – 2 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Buku Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	1 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
2	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Investasi Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efesien	1 Dokumen
	- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah Tepat Sasaran dan Akuntabel	1 Dokumen

	- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tersalurkannya dana bagi hasil provinsi sumatera utara kepada kab/kota	33 Dokumen - 4 Triwulan
	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersalurkannya bantuan keuangan provinsi sumatera utara kepada kab/kota	33 Dokumen - 1 Tahun
3	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Tersedianya data bidang keuangan daerah yang akurat	1 Dokumen - 4 Bulan
	- Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terselenggaranya proses pengelolaan data APBD pada Aplikasi SIPD	1 Kegiatan - 12 Bulan

Kegiatan

	Anggaran (Rp)
1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	150.000.000
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	100.000.000
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	35.000.000
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	175.000.000
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	30.000.000
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	180.000.000
7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	450.000.000
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	500.000.000
9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	9.000.000
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	125.000.000
11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	9.000.000
12. Analisis Investasi Pemerintah Daerah	110.000.000
13. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	50.000.000
14. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	27.000.000
15. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	25.000.000
16. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	75.000.000
17. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	500.000.000
Jumlah	2.550.000.000

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
ANGGARAN

H. MHO. RAHMADANI LUBIS, SE, MM
PEMBINA
NIP. 19721003 199303 1 005

Medan,

Pihak Pertama,

KASUBBID PENGELOLAAN
ANGGARAN II

Ahmad Syafel, SE
PENATA
NIP. 19721201 200701 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN: 2022
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Nur Ina Rahayu Nasution, MSP

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. MHD. RAHMADANI LUBIS, SE, MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
ANGGARAN

H. MHD. RAHMADANI LUBIS, SE, MM
PEMBINA
NIP. 19721003 199303 1 005

Medan,

Pihak Pertama,

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH

Dra. Nur Ina Rahayu Nasution, MSP
PEMBINA
NIP. 19690115 199503 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS tepat waktu dan sesuai ketentuan	2 Dokumen – 3 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tepat waktu dan sesuai ketentuan	2 Dokumen – 2 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Berita Acara Review RKA-SKPD	49 Dokumen – 1 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Berita Acara Review Perubahan RKA-SKPD	49 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Berita Acara Review DPA-SKPD	49 Dokumen – 1 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Berita Acara Review Perubahan DPA-SKPD	49 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Buku Peraturan Daerah Tentang APBD	1 Dokumen – 2 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Buku Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	1 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
2	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Investasi Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien	1 Dokumen
	- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah Tepat Sasaran dan Akuntabel	1 Dokumen

	- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tersalurkannya dana bagi hasil provinsi sumatera utara kepada kab/kota	33 Dokumen – 4 Triwulan
	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersalurkannya bantuan keuangan provinsi sumatera utara kepada kab/kota	33 Dokumen – 1 Tahun
3	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Tersedianya data bidang keuangan daerah yang akurat	1 Dokumen - 4 Bulan
	- Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya proses pengelolaan data APBD pada Aplikasi SIPD	1 Kegiatan – 12 Bulan

Kegiatan

	<u>Anggaran (Rp)</u>
1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	150.000.000
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	100.000.000
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	35.000.000
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	175.000.000
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	30.000.000
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	180.000.000
7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	450.000.000
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	500.000.000
9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	9.000.000
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	125.000.000
11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	9.000.000
12. Analisis Investasi Pemerintah Daerah	110.000.000
13. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	50.000.000
14. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	27.000.000
15. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	25.000.000
16. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	75.000.000
17. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	500.000.000
Jumlah	2.550.000.000

Medan,

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
ANGGARAN

H. MHD. RAHMADANI LUBIS, SE, MM
PEMBINA
NIP. 19721003 199303 1 005

Pihak Pertama,

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH

Dra. Nur Ina Rahayu Nasution, MSP
PEMBINA
NIP. 19690115 199503 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BIDANG PERBENDAHARAAN I
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yusril Ridwan,SH,MM

Jabatan : Kasubbid Perbendaharaan I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Halimatussa'diah,SE,M.AP

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Bidang Perbendaharaan
dan Kas Daerah


Halimatussa'diah,SE,M.AP
Pembina
NIP. 19660501 199007 2 001

Medan,

Pihak Pertama

Kasubbid Perbendaharaan I


Yusril Ridwan,SH. MM
Pembina
NIP. 19680409 200212 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BIDANG PERBENDAHARAAN I
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan Pengeluaran Kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Tersedianya Administrasi Keuangan yang berkaitan Pengeluaran Kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	12 Bulan

KEGIATAN

ANGGARAN

- 1 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan Rp. 263.179.152,-

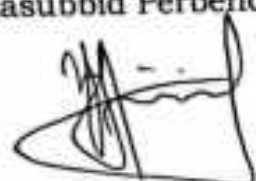
JUMLAH

Rp. 263.179.152,-

Pihak Kedua,
 Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah


 Halimatul Ussa'diah, SE. M.AP
 Pembina
 NIP. 19660501 199007 2 001

Medan,
 Pihak Pertama,
 Kasubbid Perbendaharaan I


 Yusril Ridwan, SH, MM
 Pembina
 NIP. 19680409 200212 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BIDANG PERBENDAHARAAN II
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Elyani,SE

Jabatan : Kasubbid Perbendaharaan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Halimatussa'diah,SE,M.AP

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Bidang Perbendaharaan
dan Kas Daerah

Halimatussa'diah,SE,M.AP

Pembina

NIP. 19660501 199007 2 001

Medan,

Pihak Pertama

Kasubbid Perbendaharaan II

Elyani,SE

Penata TK I

NIP. 19670215 199503 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KASUB BIDANG PERBENDAHARAAN II
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU

	SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA 3	TARGET 4
1	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	Tersedianya data realisasi pengeluaran kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	12 Bulan

KEGIATAN

ANGGARAN

- 1 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait

Rp. 563.930.608,-

JUMLAH

Rp. 563.930.608,-

Pihak Kedua,
Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah

Medan,
Pihak Pertama,
Kasubbid Perbendaharaan II


Halima Fusa'diah, SE.M.AP
Pembina
NIP. 19660501 199007 2 001


Elyani, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19670215 199503 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BIDANG KAS DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FEBRI MULIANSYAH, S.Sos
Jabatan : Kasubbid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hj. HALIMATUSA'ADIAH, SE, M.AP
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian Kinerja dan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, Januari 2022

Pihak Pertama,

KASUBBID KAS DAERAH
BPKAD PROVSU


FEBRI MULIANSYAH, S.Sos
PENATA
NIP. 19810226 200604 1 003

Pihak Kedua,

KABID PERBENDAHARAAN DAN
KAS DAERAH BPKAD PROVSU


Hj. HALIMATUSA'ADIAH, SE, M.AP
PEMBINA
NIP. 19660501 199007 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BIDANG KAS DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	12 Bulan
2	Melaksanakan penerimaan dan pencatatan bukti setoran pajak (SSP) sesuai standar yang ditetapkan terhadap SPM LS Gaji, Tunjangan dan Barang Jasa	Jumlah besaran potongan Pajak berdasarkan penerbitan SP2D telah sesuai dengan ketentuan, serta terbitnya bukti NTPN setoran pajak	235 Dokumen
3	Meningkatkan Kualitas Penerbitan SK gubernur Sumatera Utara tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Jumlah SK Gubernur Sumatera Utara perihal pengangkatan dan penggantian PPKD, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	100 Dokumen SK Gubernur
4	Melaksanakan penyusunan laporan realisasi penerimaan daerah periode bulanan berdasarkan transaksi penerimaan harian rekening koran Kas Umum Daerah	Jumlah laporan tersusun atas realisasi penerimaan daerah periode bulanan berdasarkan transaksi penerimaan harian rekening koran Kas Umum Daerah	12 Laporan
5	Melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD	Jumlah dokumen dari hasil pemantauan atas Kesesuaian penerimaan dan pengeluaran pada APBD	235 Dokumen
6	Melaksanakan penatausahaan, pengelolaan dan pengaturan aliran dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD	Jumlah kegiatan Kesesuaian penerimaan dana dengan kebutuhan pada Pelaksanaan APBD	12 Kegiatan
7	Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi penyetoran pajak pusat atas beban APBD secara berkala	Jumlah Dokumen atas Kesesuaian lugas dengan pelaksanaan	12 Dokumen
8	Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi pengeluaran daerah dengan saldo rekening bank	Jumlah data BKU sesuai dengan RKUD	235 Dokumen
9	Melaksanakan persiapan anggaran kas	Jumlah dokumen data anggaran kas sesuai standar yang ditetapkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	100 Dokumen

	Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian data di bidang Kas Daerah	Jumlah data Penerimaan APBD	235 Dokumen
11	Melaksanakan rekonsiliasi kas harian, mingguan, bulanan dan tahunan terkait data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Jumlah dokumen data kas harian, mingguan, bulanan dan tahunan atas penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	235 Dokumen
12	Melaksanakan laporan posisi kas bulanan serta laporan perkiraan belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer untuk dikirim kepada Kemenkeu sebagai syarat salur DAU	Jumlah laporan posisi kas bulanan serta laporan perkiraan belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer untuk dikirim kepada Kemenkeu sebagai syarat salur DAU	24 Laporan
13	Melaksanakan Monitoring pendapatan transfer dari pemerintah pusat, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan kas daerah, verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta pencatatan penerimaan dan pengeluaran pada BKU sesuai standar yang ditetapkan	Jumlah data penerimaan dan pengeluaran pada APBD pada BKU sesuai standar yang ditetapkan	24 Dokumen
14	Melaksanakan kegiatan Memeriksa dan menandatangani lembar verifikasi pajak atas SPM LS belanja pegawai dan barang jasa untuk proses penerbitan SP2D	Jumlah data penerimaan dan pengeluaran pada APBD pada BKU sesuai standar yang ditetapkan	12.000 Lembar SP2D

NO.	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp. 6.151.768.800,00
2.	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp. 14.150.000,00
3.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp. 387.788.304,00
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp. 517.088.304,00
5.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rp. 4.900.000,00
6.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp. 563.930.608,00
7.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Rp. 263.179.152,00

serta

ni,
en

in
n

Medan, Januari 2022

Pihak Kedua,

KABID PERBENDAHARAAN DAN
KAS DAERAH BPKAD PROVSU



HJ. HALIMAH SA'ADIAH, SE, M.AP
PEMBINA
NIP. 19680501 199007 2 001

Pihak Pertama,

KASUBBID KAS DAERAH
BPKAD PROVSU

FEBRI MULIANDIYAH, S.Sos
PENATA
NIP. 19810226 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUB BIDANG KAS DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penatausahaan dan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas daerah	Tersajinya data Kas harian, mingguan, bulanan dan tahunan	12 bulan
		Tersedianya data pembiayaan daerah untuk BUMD Provsu	12 bulan
		Terselenggaranya pelaporan dana transfer yang diterima RKUD dari RKUN	12 bulan
		Tersajinya data penerimaan dan pengeluaran APBD pada BKU sesuai standar yang ditetapkan	12 bulan
		Tertaksananya pencatatan Piutang dan Utang Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	12 bulan

NO.	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
-	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp. 6.151.768.800,00
-	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp. 14.150.000,00
-	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp. 387.788.304,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp. 517.088.304,00
-	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rp. 4.900.000,00
Jumlah		Rp. 7.075.695.408,00

Medan, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KABID PERBENDAHARAAN DAN
KAS DAERAH BPKAD PROVSU

KASUBBID KAS DAERAH
BPKAD PROVSU



Hj. HALIMATUSADIAH, SE, M.AP
PEMBINA
NIP. 19680501 199007 2 001


FEBRI M. MANSYAH, S.Sos
PENATA
NIP. 19810226 200604 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI I
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gabriel Henry W. CH. SE, M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Suwito, SE
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BPKAD PROVSU

SUWITO, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19720319 199602 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI I
BPKAD PROVSU

GABRIEL HENRY W. CH. SE, M.Si
PENATA
NIP. 19860301 201001 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI I
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1. Tersedianya Laporan Hasil Rekonsiliasi berupa LRA, LO, LPE dan Neraca	Setiap tanggal 15
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2. Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	TW I-IV T.A. 2022

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Rp 133.708.254,00
2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Rp 320.740.000,00
Total Anggaran		Rp 454.448.254,00

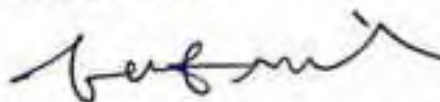
Medan, 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BPKAD PROVSU



SUWITO, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19720319 199602 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI I
BPKAD PROVSU



GABRIEL HENRY W. CH. SE, M.Si
PENATA
NIP. 19860301 201001 1 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI II
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aripin Keliat, SE
Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Suwito, SE
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BPKAD PROVSU

SUWITO, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19720319 199602 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI II
BPKAD PROVSU

ARIPIN KELIAT, SE
PENATA
NIP. 19680525 200701 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI II
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setiap Tahun Anggaran yang akuntabel dan transparan hasil gabungan dari seluruh SKPD, BLUD dan BUMD/BUMN	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara T.A. 2021 ke BPK-RI pada TW I 2022

NO	KEGIATAN	Rp	JUMLAH
1.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		595.701.600,00

Total Anggaran	Rp	595.701.600,00
-----------------------	----	-----------------------

Medan, 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BPKAD PROVSU



SUWITO, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19720319 199602 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI II
BPKAD PROVSU



ARIPIN KELIAT, SE
PENATA
NIP. 19680525 200701 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhaimi Indra Gunawan, SE, M.Si
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Suwito, SE
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan,

2022

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BPKAD PROVSU

SUWITO, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19720319 199602 1 005

Pihak Pertama,

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA BPKAD PROVSU

SUHAIMI INDRA GUNAWAN, SE, M.Si
PENATA TINGKAT I
NIP. 19770618 200904 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1. Tersedianya Laporan Keuangan Interim PemprovSU setiap bulan	Setiap tanggal 15
2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2. Tersedianya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2021 & Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2021	TW III T.A. 2022

NO.	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp 682.203.456,00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Rp 525.132.000,00
Total Anggaran		Rp 1.207.335.456,00

Medan, 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BPKAD PROVSU



SUWITO, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19720319 199602 1 005

Pihak Pertama,

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA BPKAD PROVSU



SUHAIMI INDRA GUNAWAN, SE, M.Si
PENATA TINGKAT I
NIP. 19770618 200904 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN ASET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TAUFIK AZHAR, ST, MM

Jabatan : KASUBBID PENGELOLAAN ASET BPKAD PROVSU

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RATNA SARI PINEM, SE, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG ASET BPKAD PROVSU

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

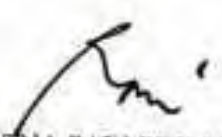
Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan,

2022

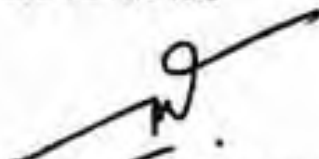
PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG ASET
BPKAD PROVSU


RATNA SARI PINEM, SE,MM
PEMBINA
NIP. 19671029 198710 2 001

PIHAK PERTAMA,

KASUBBID PENGELOLAAN ASET
BPKAD PROVSU


TAUFIK AZHAR, ST, MM
PENATA
NIP. 19811228 201410 1 003

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN ASET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Inventarisasi terhadap data Barang Milik Daerah pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	49 OPD
2	Terlaksananya pengawasan/pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara	Jumlah sosialisasi/bimbingan teknis peningkatan sumber daya manusia Aparatur Pengelola Barang Milik Daerah serta melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	33 Kab/Kota
3	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah serta pemantauan/pembinaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terhadap temuan terkait Barang Milik Daerah pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah data pencatatan pengadaan barang/jasa tahun berjalan, kapitalisasi, penyusutan, mutasi tambah kurang, hasil inventarisasi serta hibah serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3528 Data
4	Terlaksananya sosialisasi/bimbingan teknis/ coaching clinic terkait Penatausahaan Barang Milik Daerah kepada Aparatur Pengelola Barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Barang Milik Daerah pada OPD Pemprov	Jumlah sosialisasi/bimbingan teknis/coaching clinic peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pengelola Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta pemantauan/pembinaan dan pengawasan terhadap Barang Milik Daerah Pemprov	2 Kali
5	Terlaksananya penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemprov Semester I dan Semester II Tahun 2022	Jumlah laporan Barang Milik Daerah Semester I dan Semester II dalam rangka pembinaan/pemantauan/ evaluasi dan verifikasi pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	49 OPD
6	Terlaksananya rekonsiliasi data aset tetap dan barang persediaan pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah data realisasi belanja modal atau barang/jasa, mutasi tambah kurang, penghapusan, hibah aset tetap dan barang persediaan pada OPD di lingkungan Pemprov	3528 Data
7	Adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	2 Regulasi

Kegiatan	Jumlah
1. Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp. 444.400.000
2. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 165.416.750
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.280.229.869
4. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 160.645.000
5. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp. 510.945.070
6. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp. 212.483.000
7. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 294.987.000
JUMLAH	Rp. 3.069.106.689

PIHAK KEDUA :

KEPALA BIDANG ASET



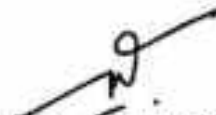
RATNA SARI PINEM, SE, MM
PEMBINA
 NIP. 19671029 198710 2 001

Medan,

2022

PIHAK PERTAMA :

KASUBBID PENGELOLAAN ASET



TAUFIK AZHAR, ST, MM
PENATA
 NIP. 19811228 201410 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN: 2022
KEPALA SUB BIDANG BINA KEUANGAN I
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novanty, SE, MM

Jabatan : Kepala Sub Bidang Bina Keuangan I Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. Juliadi Zurdani Hrp, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Drs. JULIADI ZURDANI HRP, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 197220726 199203 1 003

Medan,

Pihak Pertama,

KASUBBID BINA KEUANGAN I

NOVANTY, SE, MM
PENATA
NIP. 19751104 200604 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BIDANG BINA KEUANGAN I
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tepat Waktu	1 Tahun Anggaran
	Evaluasi Ranperda tentang APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD Kab./Kota	- Terlaksananya evaluasi APBD Kab/Kota antara lain sinkronisasi APBD Kab./Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan provinsi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik - Terlaksananya monitoring Penyempurnaan APBD Kab./Kota terhadap hasil evaluasi gubernur - Tersedianya rekap data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah kab./kota	33 dokumen dari 11 kab./kota
	Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota	- Terlaksananya evaluasi Perubahan APBD Kab/Kota antara lain sinkronisasi Perubahan APBD Kab./Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan provinsi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik - Terlaksananya monitoring Penyempurnaan Perubahan APBD Kab./Kota terhadap hasil evaluasi gubernur - Tersedianya rekap data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah kab./kota	33 dokumen dari 11 kab./kota 44 dokumen LRA dari 11 Kab/Kota 150 Dokumen data dari 11 Kabupaten/Kota
	Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota	Terlaksananya evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota antara lain sinkronisasi Pertanggungjawaban	33 dokumen dari 11 kab./kota

		Pelaksanaan Kab./Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan provinsi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik • Terlaksananya monitoring Penyempumaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota terhadap hasil evaluasi gubernur • Tersedianya rekap data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah kab./kota • Tersedianya rekapitulasi data LRA	
	- Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terselesainya masalah di Kabupaten/Kota terkait pengelolaan keuangan	11 Kab/Kota dalam 1 tahun anggaran
	- Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan rapat teknis terkait pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota se Sumut	2 kegiatan dalam 1 Tahun Anggaran

Sub Kegiatan

1. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	<u>Anggaran</u> Rp 238.418.500,00
2. Evaluasi Ranperda APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD Kab./Kota	Rp 241.129.405,00
3. Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kab./Kota dan Ranperkada Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota	Rp 99.254.667,00
4. Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp 127.081.000,00
5. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota	Rp 26.388.333,00
Jumlah.....	Rp 732.271.905,00

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
BPKAD PROVSU

Drs. JULIADI ZURDANI HRP, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 197220726 199203 1 003

Medan,

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BIDANG
BINA KEUANGAN I
BPKAD PROVSU

NOVANTY, SE, MM
PENATA
NIP. 19751104 200604 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN: 2022
KEPALA SUB BIDANG BINA KEUANGAN II
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Huddin Sani Pane, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Bidang Bina Keuangan II Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. Juliadi Zurdani Hrp, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
BPKAD PROVSU

Drs. JULIADI ZURDANI HRP, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 197220726 199203 1 003

Medan,

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BIDANG
BINA KEUANGAN II
BPKAD PROVSU

HUDDIN SANI PANE, S.Sos
PENATA TK I
NIP. 19710516 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BIDANG BINA KEUANGAN II
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tepat Waktu	1 Tahun Anggaran
	- Evaluasi Ranperda tentang APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD Kab./Kota	• Terlaksananya evaluasi APBD Kab/Kota antara lain sinkronisasi APBD Kab./Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan propinsi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik • Terlaksananya monitoring Penyempurnaan APBD Kab./Kota terhadap hasil evaluasi gubernur • Tersedianya rekap data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah kab./kota	• 33 dokumen dari 11 kab./kota
	- Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota	• Terlaksananya evaluasi Perubahan APBD Kab/Kota antara lain sinkronisasi Perubahan APBD Kab./Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan propinsi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik • Terlaksananya monitoring Penyempurnaan Perubahan APBD Kab./Kota terhadap hasil evaluasi gubernur • Tersedianya rekap data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah kab./kota	• 33 dokumen dari 11 kab./kota • 44 dokumen LRA dari 11 Kab/Kota • 150 Dokumen data dari 11 Kabupaten/Kota

- Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota	• Terlaksananya evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota antara lain sinkronisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kab./Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan provinsi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik • Terlaksananya monitoring Penyempurnaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota terhadap hasil evaluasi gubernur • Tersedianya rekap data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah kab./kota • Tersedianya rekapitulasi data LRA	• 33 dokumen dari 11 kab./kota
- Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya masalah di Kabupaten/Kota terkait pengelolaan keuangan	11 Kab/Kota dalam 1 tahun anggaran

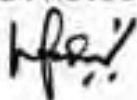
Sub Kegiatan

1. Evaluasi Ranperda APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD Kab./Kota	Rp 241.129.405,00
2. Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kab./Kota dan Ranperkada Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota	Rp 99.254.667,00
3. Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp 127.081.000,00
4. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota	Rp 26.388.333,00
Jumlah.....	Rp 493.853.405,00

Anggaran

Pihak Kedua,

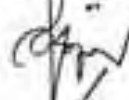
KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
BPKAD PROVSU



Drs. JULIADI ZURDANI HRP, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 197220726 199203 1 003

Medan,
Pihak Pertama,

KEPALA SUB BIDANG
BINA KEUANGAN-II
BPKAD PROVSU



HUDDIN SANI PANE, S.Sos
PENATA TK I
NIP. 19710516 199103 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN: 2022
FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR / KEPALA SUB BIDANG BINA KEUANGAN III
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fachrizal Syahputra Lukman, SE
Jabatan : Fungsional Sub Koordinator/Kepala Sub Bidang Bina Keuangan III
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. Juliadi Zurdani Hrp, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Drs. JULIADI ZURDANI HRP, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 197220726 199203 1 003

Medan,

Pihak Pertama,
FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR /
KASUBBID BINA KEUANGAN III

FACHRIZAL SYAHPUTRA LUKMAN, SE
PEMBINA
NIP. 19700102 199203 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR / KEPALA SUB BIDANG BINA KEUANGAN III
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tepat Waktu	1 Tahun Anggaran
	- Evaluasi Ranperda tentang APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD Kab./Kota	• Terlaksananya evaluasi APBD Kab./Kota antara lain sinkronisasi APBD Kab./Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan propinsi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik • Terlaksananya monitoring Penyempurnaan APBD Kab./Kota terhadap hasil evaluasi gubernur • Tersedianya rekap data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah kab./kota	• 33 dokumen dari 11 kab./kota
	- Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota	• Terlaksananya evaluasi Perubahan APBD Kab./Kota antara lain sinkronisasi Perubahan APBD Kab./Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan propinsi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik • Terlaksananya monitoring Penyempurnaan Perubahan APBD Kab./Kota terhadap hasil evaluasi gubernur • Tersedianya rekap data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah kab./kota	• 33 dokumen dari 11 kab./kota • 44 dokumen LRA dari 11 Kab/Kota • 150 Dokumen data dari 11 Kabupaten/Kota

-	Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota	• Terlaksananya evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota antara lain sinkronisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kab./Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan propinsi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik • Terlaksananya monitoring Penyempurnaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota terhadap hasil evaluasi gubernur • Tersedianya rekap data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah kab./kota • Tersedianya rekapitulasi data LRA	• 33 dokumen dari 11 kab./kota
-	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terselesaikannya masalah di Kabupaten/Kota terkait pengelolaan keuangan	11 Kab/Kota dalam 1 tahun anggaran

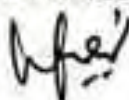
Sub Kegiatan

1. Evaluasi Ranperda APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD Kab./Kota	Rp 241.129.405,00
2. Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kab./Kota dan Ranperkada Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota	Rp 99.254.867,00
3. Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp 127.081.000,00
4. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota	Rp 26.388.333,00
Jumlah.....	Rp 493.853.405,00

Anggaran

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
BPKAD PROVSU



Drs. JULIADI ZURDANI HRP, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 197220726 199203 1 003

Medan,
Pihak Pertama,

FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR /
KEPALA SUB BIDANG BINA
KEUANGAN III BPKAD PROVSU



FACHRIZAL SYAHPUTRA LUKMAN, SE
PEMBINA
NIP. 19700102 199203 1 012



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN ASET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TAUFIK AZHAR, ST, MM

Jabatan : KASUBBID PENGELOLAAN ASET BPKAD PROVSU

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SUWITO, SE

Jabatan : KEPALA BIDANG ASET BPKAD PROVSU

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan,

2022

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG ASET
BPKAD PROVSU

SUWITO, SE
PENATA TK I
NIP. 19720319 199602 1 005

PIHAK PERTAMA,

KASUBBID PENGELOLAAN ASET
BPKAD PROVSU

TAUFIK AZHAR, ST, MM
PENATA
NIP. 19811228 201410 1 003

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN ASET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Inventarisasi terhadap data Barang Milik Daerah pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	49 OPD
2	Terlaksananya pengawasan/pembinaan/sosialisasi/bimbingan teknis terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara	Jumlah sosialisasi/bimbingan teknis peningkatan sumber daya manusia Aparatur Pengelola Barang Milik Daerah serta melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	33 Kab/Kota
3	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah serta pemantauan/pembinaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terhadap temuan terkait Barang Milik Daerah pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah data pencatatan pengadaan barang/jasa tahun berjalan, kapitalisasi, penyusutan, mutasi tambah kurang, hasil inventarisasi serta hibah serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3528 Data
4	Terlaksananya sosialisasi/bimbingan teknis/coaching clinic terkait Penatausahaan Barang Milik Daerah kepada Aparatur Pengelola Barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Barang Milik Daerah pada OPD Pemprov	Jumlah sosialisasi/bimbingan teknis/coaching clinic peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pengelola Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta pemantauan/pembinaan dan pengawasan terhadap Barang Milik Daerah Pemprov	2 Kali
5	Terlaksananya penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemprov Semester I dan Semester II Tahun 2022	Jumlah laporan Barang Milik Daerah Semester I dan Semester II dalam rangka pembinaan/pemantauan/ evaluasi dan verifikasi pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	49 OPD
6	Terlaksananya rekonsiliasi data aset tetap dan barang persediaan pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah data realisasi belanja modal atau barang/jasa, mutasi tambah kurang, penghapusan, hibah aset tetap dan barang persediaan pada OPD di lingkungan Pemprov	3528 Data
7	Adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	2 Regulasi

Kegiatan**Jumlah**

1. Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp. 444.400.000
2. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 165.416.750
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.280.229.869
4. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 160.645.000
5. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp. 510.945.070
6. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp. 212.483.000
7. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 294.987.000
	Rp. 3.069.106.689

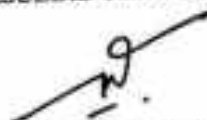
JUMLAH

2022

Medan,

PIHAK KEDUA :**KEPALA BIDANG ASET**

SUWITO, SE
PENATA TK I
NIP. 19720319 199602 1 005

PIHAK PERTAMA :**KASUBBID PENGELOLAAN ASET**

TAUFIK AZHAR, ST, MM
PENATA
NIP. 19811228 201410 1 003